

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KESEJATERAAN MASYARAKAT DI
DESA TOWUNTU TIMUR KECAMATAN PASAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**MEITA EUNIKE EKLESIA SIGAR KANSIL
FLORENCE DAICY J. LENGKONG
VERY YOHANIS LONDA**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISPOL Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: Meitakansil@yahoo.com

Abstrack

Public welfare is the aim and effort of the government through efforts such as increasing economic growth. To improve community welfare is inseparable from the implementation of policies. In implementing existing policies, development must be truly carried out in accordance with what is formulated by the village apparatus and the community. The purpose of this study was to determine the implementation of community welfare improvement policies in East Towuntu Village, Pasan Sub-District, Southeast Minahasa Regency. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. To see how the implementation of community welfare improvement policies in East Towuntu Village. In terms of indicators in accordance with the research focus of researchers, namely Idealized polic, Target groups, Implementing organizations, and Environmental factors. In reality, the implementation of policies to improve welfare for development also has not yet become a priority but has been forced to work, even though the results have not yet benefited the community, and need attention to the government of East Towuntu Village. In compiling planning, the village government should conduct a comprehensive study so that the results of development are right on target and in accordance with needs, not just thinking that the important thing is not to break the rules, in the end one of the objectives of the dandes is to improve community welfare.

Keywords: Implementation, Improvement, Community welfare.

Abstrak

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang ada, pembangunan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan yang dirumuskan oleh aparatur desa dengan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa towuntu timur kecamatan pasan kabupaten minahasa tenggara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa towuntu timur. Dilihat dari segi indikator sesuai dengan fokus penelitian dari peneliti yaitu *Idealized polic, Target groups, Implementing organization, dan Environmental factors*. Dalam realitanya dalam implementasi kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan untuk juga pembangunan yang sebenarnya belum jadi prioritas tapi dipaksakan untuk dikerjakan, padahal hasilnya belum memberi manfaat bagi masyarakat, dan perlu jadi perhatian untuk pemerintah Desa Towuntu Timur. Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan harusnya melakukan kajian komprhensif agar hasil pembangunan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, bukan hanya berpikir yang penting tidak melanggar aturan, pada akhirnya salah satu tujuan dandes yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Peningkatan, Kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam implementasinya yaitu (1) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; (3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; (4) meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan (5) meningkatkan daya saing Desa.

Disamping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang ada, pembangunan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan yang dirumuskan oleh aparatur desa dengan masyarakat.

Salah satu contoh sebagaimana di Minahasa Tenggara memiliki 135 desa, dan belum semua yang memberdayakan badan usaha milik desa atau Bumdes. Padahal jika dikelola dengan baik, dapat memberi keuntungan terhadap perekonomian masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Sejauh ini Pemerintah Desa masih lebih fokus pada pembangunan fisik dan belum menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas. Padahal Pekerjaan pembangunan fisik penting, tapi ada baiknya jika mulai diseimbangkan dengan pemberdayaan yang menasar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menariknya, dalam program yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan didapati sebagian besar pemerintah desa dalam menyusun program, lebih berpikir bagaimana menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan bagaimana mendapatkan income untuk desa. Dalam realitanya dalam implementasi kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan untuk juga pembangunan yang sebenarnya belum jadi prioritas tapi dipaksakan untuk dikerjakan, padahal hasilnya belum memberi manfaat bagi masyarakat, dan perlu jadi perhatian untuk pemerintah Desa Towuntu Timur. Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan harusnya melakukan kajian komprehensif agar hasil pembangunan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, bukan hanya berpikir yang penting tidak melanggar aturan, pada akhirnya salah satu tujuan dandes yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan maksimal.

Berbagai program pembangunan untuk kepentingan masyarakat terus dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan 13 program prioritas yang kesemuanya untuk kepentingan masyarakat di seluruh pelosok Minahasa Tenggara. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 terdiri dari pemberian jaminan kesehatan,

pemberian dana duka, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan aparat desa/kelurahan serta ASN, peningkatan sarana prasarana olahraga, pemberian bantuan sosial untuk lansia, pembangunan jalan, jembatan, drainase dan irigasi, pengembangan pasar, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, peningkatan pelayanan publik, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah juga menjadi program prioritas yang sudah berjalan, tapi tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Sesuai dengan fokus penelitian peneliti bahwa *idealized policy* yaitu program berupa bantuan dari bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan dan tempat penampungan air, serta pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat menggunakan dana desa serta *Targets Groups* dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Towuntu timur serta *Environmental factors* dalam faktor lingkungan dapat menjadi hal yang penting dalam implementasinya.

Dalam realitanya dilapangan ditemukan dalam program Peningkatan Kesejahteraan di Kabupaten Minhasa Tenggara yang ada di Desa Towuntu Timur yaitu pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah dalam membangun drainase kemudian dana yang tersisah dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. Kesejahteraan masyarakat desa dalam implementasinya sangat memerlukan perhatian pemerintah dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Towuntu Timur masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari pendapatan perkapita rumah tangga yang masih rendah, tingkat pendidikan masih rendah dan fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai. Mayoritas masyarakat di desa bekerja sebagai seorang petani dengan penghasilan mereka dapatkan. Seringkali kebutuhan pokok kadang terpenuhi kadang tidak, sehingga pemerintah

memberikan bantuan kepada masyarakat, Dalam realitanya dilapangan kebijakan pemerintah dalam implementasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih tertinggal pilih kasih, dimana mereka terkadang mendahulukan kerabat serta keluarganya. Sedangkan masyarakat yang tergolong kurang mampu di biarkan dan menunggu begitu lama. Beberapa masalah tersebut dapat mengindikasikan masih lemahnya penerapan kebijakan desa. Namun demikian indikasi masalah tersebut tentu harus dikaji secara ilmiah berdasarkan fakta yang ada, sehingga penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Towuntu Timur Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara ?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hassel (dalam Tangkilisan, 2004:7) Implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang respon berupa aksi/tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2004:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengatakan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tahap implementasi

tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran –saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Smith dalam prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara, Islamy (2001: 80-81), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- a. *Idealized policy*, yakni pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya. Suatu kebijakan harus dilandasi oleh landasan hukum yang mengikat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. *Target groups*, yakni bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan Masyarakat sebagai sasaran utama suatu kebijakan/target grup haruslah disesuaikan dengan pengawasan yang optimal agar tetap pada frekuensi yang sesuai dengan konsep pada sasaran yang ada.
- c. *Implementing organization*, yakni badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Dalam kata lain, Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan haruslah sigap dalam pencapaian target dari kebijakan yang sehingga setiap regulasi yang disusun tak akan menjadi hambatan dimasa yang akan datang karena tercapai sesuai target.
- d. *Environmental factors*, yakni unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial ekonomi dan politik. Pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada akan sangat menentukan kemana arah kebijakan.

Karena kebijakan yang baik yang dilandasi dengan lingkungan yang baik akan menciptakan hasil atau produk kebijakan yang terbaik.

Orina Kagoya, Martha Ogotan, Very Londa. (2020). Implementasi Program Beras Sejahtera Didesa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya. Minahasa (Jurnal Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol. VI. No 088, 2020). Implementasi program beras sejahtera dilihat dari empat dimensi implementasi kebijakan publik dari Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian adalah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Makki, Kepala Desa Guburini, Ketua BPD, Ketua Pokja Pelaksana Distribusi Rastra Desa Gurubuni, dan warga masyarakat penerima rastra. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan 1) Komunikasi dalam rangka implementasi program Rastra/Raskin di Desa Guburini dilaksanakan dengan cukup baik/efektif. Program Rastra/Raskin disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), oleh pemerintah desa, oleh BPD, dan oleh kelompok kerja pelaksana distribusi rastra Desa Guburini. 2) Sumber daya manusia pelaksana program rastra/raskin tersedia yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kelompok kerja pelaksana distribusi rastra/raskin, dan dibantu oleh aparat desa. Sumberdaya finansial untuk pelaksanaan program rastra/raskin disediakan biaya operasional pelaksanaan rastra/raskin. 3) Disposisi atau sikap pelaksana sudah cukup baik dilihat dari komitmen, konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis dalam melaksanakan program. 4) Struktur birokrasi/organisasi dalam pelaksanaan program rastra/raskin sudah tertata dengan baik dilihat dari struktur organisasi dan mekanisme pelaksanaan program rastra di

desa yang sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor 1975 (dalam Moleong, 2006:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Sedangkan menurut Gunawan (2015:80-81) penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan pada analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah (Gunawan, 2015:80-81).

Sumber data penelitian merupakan faktor sangat penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data adalah subjek penelitian tempat data menempel (Sangadji & Sopiah, 2010: 44). Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Penggunaan sumber data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan keinginan peneliti karena data yang diperoleh lebih relevan dan akurat. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui wawancara tatap muka antara peneliti dan informan, serta meninjau obyek observasi yang berhubungan.
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari catatan-catatan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Towuntu Timur Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama (Moleong, 2006). Oleh karena itu dalam pengumpulan data/informasi digunakan metode/teknik sebagai berikut :

1. Observasi yaitu suatu teknik dengan mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 76-77) Pada penelitian kualitatif, observasi merupakan salah satu mengumpulkan data yang populer. Untuk terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman tersebut biasanya dalam bentuk daftar cek (chek list) atau daftar isian. Adapaun aspek yang diobservasi meliputi berperilaku, keadaan fisik, pertumbuhan dan perkembangan subjek tertentu dan sebagainya. (Danim, 2002: 140).
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006:135). Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan, diantaranya dikemukakan oleh Patton (dalam Moleong, 2006:197).
3. Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk

juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsir, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2006:191).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Towuntu Timur sebagai berikut :

1. *Idealized policy*

Menurut Smith (dalam Islamy 2001: 80-81) *Idealized policy* adalah pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya. Suatu kebijakan harus dilandasi oleh landasan hukum yang mengikat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa program peningkatan kesejahteraan yang dijalankan oleh pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik, program tersebut berupa bantuan dari bidang kesehatan, pembagunan infrastruktur jalan dan tempat penampungan air, serta pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat menggunakan dana desa. Hal itu disepakati bersasarkan aturan yang diatur dalam musyawarah desa, ada juga surat keputusan dari hukum tua desa.

2. *Target groups*

Menurut (dalam Islamy 2001: 80-81) *Target groups* adalah bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan

Masyarakat sebagai sasaran utama suatu kebijakan/target grup haruslah disesuaikan dengan pengawasan yang optimal agar teta pada frekuensi yang sesuai dengan konsep pada sasaran yang ada. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat mendukung, dari masyarakat saling membantu gotong royong untuk melaksanakan program-program pemerintah. Walaupun dalam setiap program ada beberapa pendapat masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah dalam memberikan bantuan masih belum tepat sasaran, dalam hal ini yaitu prioritaskan antara yang sangat membutuhkan dan masyarakat yang masih bisa bertahan dari segi perekonomian yang dimiliki. Selanjutnya dalam aspek secara kehidupan sosial banyak mengalami keringanan lewat bantuan-bantuan sosial yang ada

3. *Implementing organization*

Menurut Smith (dalam Islamy 2001: 80-81) *Implementing organization* adalah badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Dalam kata lain, Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan haruslah sigap dalam pencapaian target dari kebijakan yang sehingga setiap regulasi yang disusun tak akan menjadi hambatan dimasa yang akan datang karena tercapai sesuai target. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hambatan pemerintah dalam penerapan peningkatan kesejahteraan masyarakat Towuntu Timur tidak memiliki masalah berdasarkan wawancara kepada masyarakat, dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah rata-rata mengatakan berjalan dengan lancar dan tidak memiliki hambatan yang terjadi di kalangan masyarakat.

4. *Environmental factors*

Menurut Menurut Smith (dalam Islamy 2001: 80-81) *Environmental factors* adalah unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial ekonomi dan

politik. Pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada akan sangat menentukan kemana arah kebijakan. Karena kebijakan yang baik yang dilandasi dengan lingkungan yang baik akan menciptakan hasil atau produk kebijakan yang terbaik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor lingkungan berupa aspek kebudayaan sudah sangat berkurang pada saat ini, dikarenakan alasan pandemik Covid-19 masyarakat masih melakukan sosial distance dan tingkat perekonomian desa juga menurun karena hal ini. Karena mayoritas pekerjaan masyarakat disini sebagai petani, 60-70% sebagai petani dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah sangat maju dan terbantu karena adanya bantuan-bantuan bagi masyarakat baik dalam pembangunan, dalam bidang kesehatan juga, bahkan bantuan-bantuan untuk petani yang ada, sehingga rasa kesejahteraan dari masyarakat yang ada masyarakat dapat merasakan program-program dari pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan mengenai implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Towuntu Timur yang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa Towuntu Timur sudah berjalan dengan baik. Hal itu dilihat dari program yang dilakukan berupa pembagunan infrastruktur jalan, penampungan air, kesehatan dan bidang pendidikan dan bantuan langsung tunai (BLT).
2. Target sasaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Towuntu Timur masih dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari tanggapan masyarakat tentang prioritas penerima bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan PKH.
3. Keberhasilan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa masih tergolong baik. Dilihat dari respon masyarakat yang mengatakan

bahwa pemerintah sudah menjalankan program-program dengan baik.

4. Faktor keberhasilan pemerintah dari aspek sosial, budaya dan politik kehidupan masyarakat Desa Towuntu Timur tergolong baik. Dilihat kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam swadaya dan gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat menyampaikan saran terkaiti implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Towuntu Timur sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah jajaran pemerintah Desa Towuntu Timur untuk selalu melakukan sosialisasi program kepada masyarakat.
2. Perlu adanya pengawasan dan transparansi mengenai pemberian bantuan kepada masyarakat.
3. Mendorong masyarakat untuk untuk meningkatkan kemampuan bertani dalam meningkatkan kesejahteraan desa.
4. Pemerintah harus proaktif dalam meningkatkan perekonomian melalui pemberian bantuan modal mapun pemberian bantuan pupuk kepada masyarakat untuk peningkatan perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, I. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bandung: PT. Bina Aksara.
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, R. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Orina Kagoya, Martha Ogotan, Very Londa. 2020. *Implementasi Program Beras Sejahtera Didesa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten Lanny Jaya*, Jurnal

Administrasi Publik Fispol Unsrat Vol.
VI. No 088, 2020.

Sangadji, E. dan M, Sopiah. 2010. *Metodologi
Penelitian Pendekatan Praktis dalam
Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sumber-sumber lainnya:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa